



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Gedung Keuangan Negara Surabaya I, Jalan Indrapura 5 Surabaya 60175
Telepon: (031)3523093-96, Faksimil: (031) 3558640
Website: www.djpbk.kemenkeu.go.id/kanwil/jatim/id

Nomor : S-266/WPB.16/BD.04/2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Buku
Hal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional Jawa Timur
Triwulan II Tahun 2018

13 Agustus 2018

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat

Bersama ini disampaikan Kajian Fiskal Regional Jawa Timur Triwulan II Tahun 2018 yang didalamnya antara lain memuat perkembangan indikator pembangunan maupun indikator makroekonomi regional serta perkembangan pelaksanaan anggaran pusat dan daerah di Jawa Timur pada periode sampai dengan Triwulan II Tahun 2018, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017.

Softcopy laporan hasil kajian dimaksud kami kirimkan melalui surel ke alamat: lo.ditpa@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

R. Wiwin Istanti

NIP. 196903311995012001 9



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan II
2018

Penyusun:
Penanggung Jawab: R. Wiwin Istanti II Ketua Tim: Heru Kutanto I Editor: Bagus
Jatmiko I Desain Grafis: Arni Widjarmity I Anggota: R. Irwandha Triyono I
Isti Wahjuli I Nunuk Hindriastutik I Meri Nurami I Surini I Indah Sridiyastuti I
Ali Purboyo I Sukarsiningsih I Albertin Upa I Praptiningdyah N. I

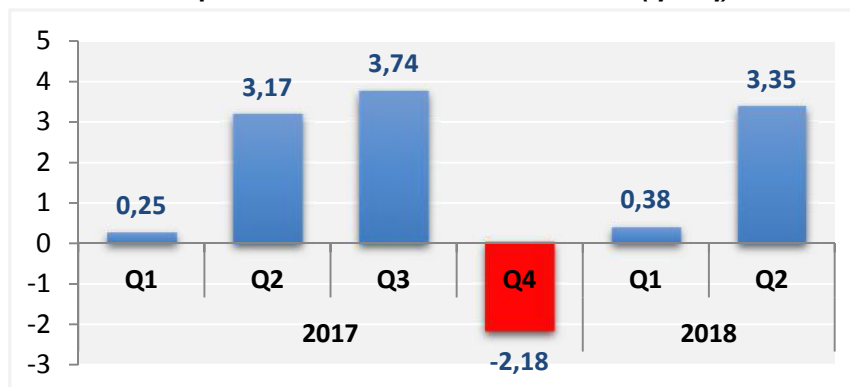
**KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN**
PROVINSI JAWA TIMUR

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Bruto

Perekonomian Jawa Timur triwulan II-2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp544,44 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp388,54 triliun. Ekonomi Jawa Timur triwulan II-2018 mengalami kenaikan 5,57 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*y-to-y*), yakni sebesar 5,46 persen. Sedangkan secara *q-to-q* pertumbuhan ekonomi jatim naik menjadi 3,5 persen pada triwulan II dibandingkan triwulan I tahun 2018 sebesar 0,38 persen. Dari sisi produksi, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif kecuali Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,56 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,36 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,23 persen.

Grafik 1.1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur per Triwulan Tahun 2017 dan 2018 (*q to q*)

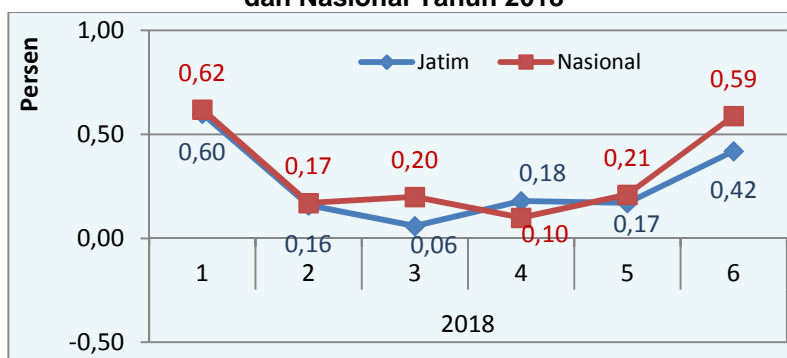


Sumber: BPS

B. Inflasi

Inflasi di Jawa Timur Tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Pada Triwulan II-2018 puncak inflasi terjadi pada bulan Juni yakni sebesar 0,42 persen. Namun, inflasi bulan Juni 2018 tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2017 sebesar 0,49 persen. Hampir seluruh kelompok pembentuk Indeks Harga Konsumen (IHK) menjadi penyumbang angka inflasi di Jawa Timur pada triwulan II-2018.

Grafik 1.2 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018

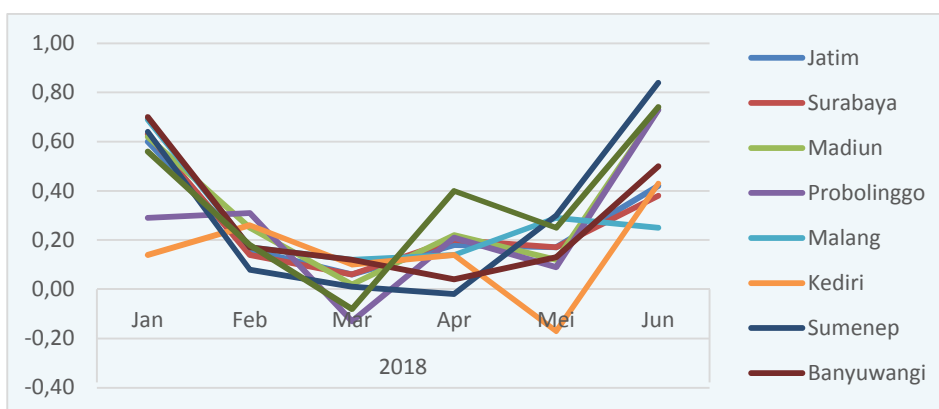


Sumber: BPS

Pada bulan April 2018 Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,18 persen. Inflasi terjadi hampir di seluruh kota di Jawa Timur. Kota Jember memiliki angka inflasi paling tinggi yaitu 0,40 persen sedangkan deflasi terjadi di Sumenep sebesar 0,02 persen. Komoditas utama yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi di Jawa Timur bulan April 2018 adalah kelompok sandang. Pada bulan Mei 2018 Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,17 persen, sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan April 2018. Inflasi terjadi hampir di seluruh kota di Jawa Timur. Kota Sumenep memiliki angka inflasi paling tinggi yaitu 0,30 persen, sedangkan deflasi terjadi di Kota Kediri sebesar 0,17 persen.

Inflasi di Jawa Timur pada bulan Juni 2018 adalah sebesar 0,42 persen. Inflasi terjadi di seluruh kota di Jawa Timur. Kabupaten Sumenep memiliki angka inflasi paling tinggi yaitu 0,84 persen sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Malang yaitu sebesar 0,25 persen. Inflasi di bulan Juni 2018 merupakan fenomena wajar mengingat pada bulan tersebut bertepatan dengan momen puasa ramadhan dan hari raya idul fitri.

Grafik 1.3 Tingkat Inflasi 8 Kota dan Jawa Timur Tahun 2018

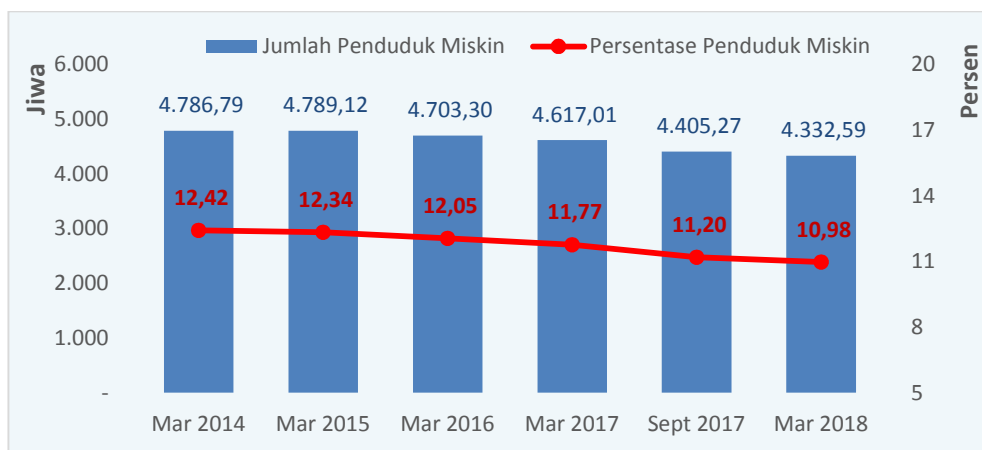


Sumber: BPS

C. Indikator Kesejahteraan

Secara umum tingkat kemiskinan di Jawa Timur dalam kurun waktu Maret 2014 s.d. Maret 2018 terus mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin juga terus turun pada bulan Maret 2018.

Grafik 1.4 Tingkat Kemiskinan Jawa Timur Tahun 2014-2017



Sumber: BPS

Grafik diatas menggambarkan tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu tahun 2014-2018. Dalam kurun waktu September 2017 s.d. Maret 2018, prosentase penduduk miskin Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0,22 poin persen, yaitu dari 11,20 persen September 2017 menjadi 10,98 persen pada Maret 2018. Penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur ini disebabkan antara lain turunnya tingkat inflasi, meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat dan berkurangnya tingkat pengangguran terbuka. Penurunan selama satu semester tersebut ditunjukkan dengan turunnya jumlah penduduk miskin sebesar 72,68 ribu jiwa yang semula berjumlah 4.405,27 ribu jiwa pada September 2017 menjadi 4.332,59 ribu jiwa pada Maret 2018.

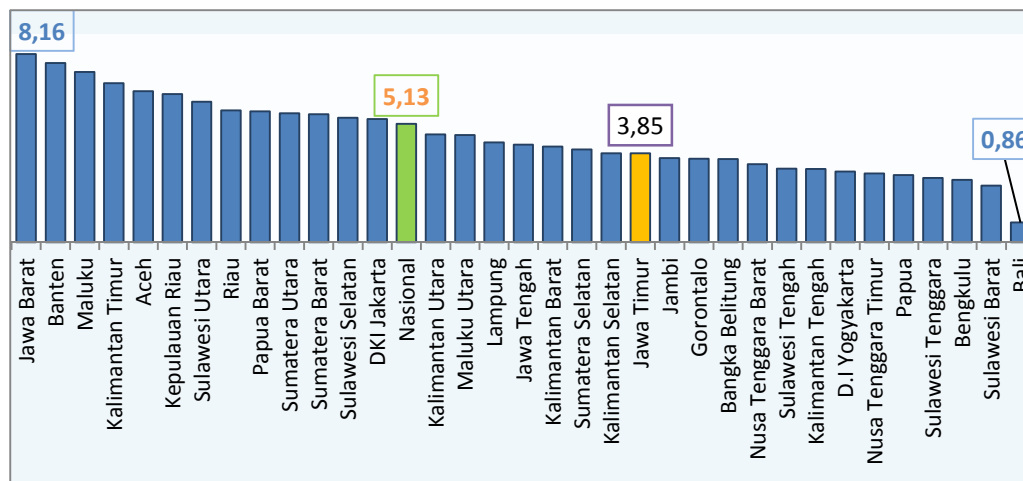
Beberapa faktor yang terkait dengan penurunan prosentase penduduk miskin selama periode September 2017 s.d. Maret 2018 antara lain adalah:

- a. Terjadi inflasi umum sebesar 1,78 persen.
- b. Harga eceran beberapa komoditas bahan pokok mengalami penurunan seperti gula pasir, tahu mentah dan tempe mentah.
- d. Indeks upah buruh tanaman pangan mengalami kenaikan sebesar 5,51 persen.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibanding peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan,

dan kesehatan). Pada bulan Maret 2018, kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 74,24 persen.

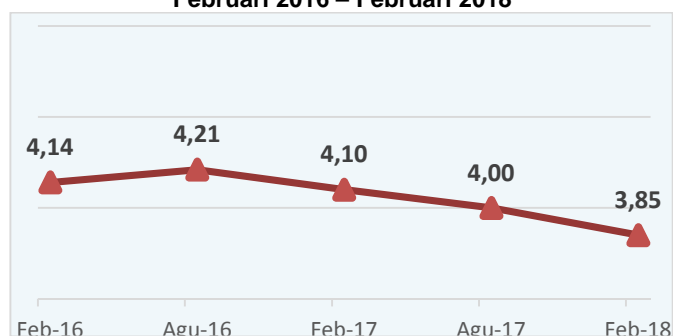
Grifik 1.5 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Seluruh Provinsi di Indonesia Pada Bulan Februari Tahun 2018



Sumber: BPS

Badan Pusat Statistik mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2018 yang dituangkan dalam grafik diatas adalah sebesar 3,85 persen. TPT ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 4,21 persen. Bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi besar di Indonesia, Jawa Timur memiliki Tingkat Pengangguran Terendah (TPT), bahkan lebih rendah bila dibandingkan dengan TPT tingkat nasional sebesar 5,13 persen.

Grifik 1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur Februari 2016 – Februari 2018



Sumber : BPS

TPT Jawa Timur dari Februari 2016 sampai dengan Februari 2018 terus mengalami penurunan hingga pada angka 3,85 persen. Secara umum dalam kurun waktu 3 tahun, jumlah pekerja di sektor informal cenderung semakin menurun dan beralih ke sektor formal. Hal ini dapat menjadi indikasi semakin membaiknya perekonomian di Jawa Timur karena pangsa pasar kerja Sektor Formal mengalami kenaikan.

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Perkembangan pelaksanaan APBN lingkup Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel2.1 PagudanRealisasi APBN LingkupProvinsiJawaTimur s.d.AkhirTriwulan II Tahun 2017danTahun 2018

(dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA	180.145,74	67.320,34	195.596,45	70.590,04
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	180.145,74	67.320,34	195.596,45	70.590,04
1. Penerimaan Pajak	176.207,79	64.451,17	187.276,81	67.343,94
2. PNPB	3.937,95	2.869,18	8.319,65	3.246,10
II. HIBAH	-	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	119.477,87	54.808,30	119.368,44	56.528,32
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	38.570,29	15.295,42	44.375,07	16.771,08
1. Belanja Pegawai	19.375,98	8.607,61	19.926,67	9.176,72
2. Belanja Barang	11.011,75	4.995,11	16.310,64	6.064,62
3. Belanja Modal	7.942,01	1.610,43	8.088,19	1.507,84
4. Belanja Bantuan Sosial	240,55	82,26	49,57	21,90
5. Belanja Lain-lain	-	-	-	-
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	80.907,59	39.512,88	74.993,37	39.757,24
1. Transfer Ke Daerah	74.568,03	35.715,75	68.649,76	35.963,39
a. Dana Perimbangan	73.886,05	35.299,76	67.654,51	35.465,76
1) Dana Alokasi Umum	39.827,73	23.436,51	39.914,88	23.283,68
2) Dana Bagi Hasil	14.269,22	4.023,79	8.302,61	3.411,13
3) Dana Alokasi Khusus	19.789,10	7.839,45	19.437,02	8.770,95
i) DAK Fisik	5.006,53	1.325,49	3.779,00	468,36
ii) DAK Non Fisik	14.782,57	6.513,96	15.658,02	8.302,60
b. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DI Yogyakarta, dan Dana Insentif Daerah	681,98	415,99	995,25	497,63
2. Dana Desa	6.339,56	3.797,13	6.343,61	3.793,85
C. SURPLUS/DEFISIT	60.667,87	12.512,04	76.228,01	14.061,72

Sumber: SPAN

Anggaran Pendapatan Negara lingkup Provinsi Jawa Timur tahun 2018 mengalami peningkatan 8,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan negara s.d. Triwulan II-2018 sebesar Rp70,59 triliun meningkat sebesar Rp3,27 triliun bila dibandingkan dengan Triwulan II-2017. Pagu Belanja Negara tahun 2018 sebesar Rp119,37 triliun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp119,48 triliun. Realisasi belanja s.d. Triwulan II-2018 sebesar Rp56,53 triliun, meningkat dibandingkan belanja negara pada Triwulan II-2017 yaitu Rp54,81 triliun. Surplus APBN sampai dengan Triwulan II-2018 sebesar Rp14,06 triliun, meningkat 12,38 persen dibandingkan dengan tahun 2017.

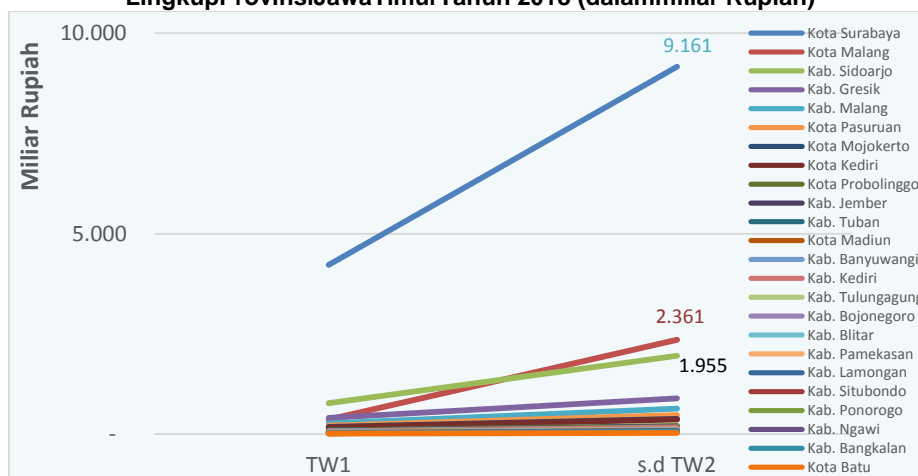
A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

a) Pajak Penghasilan (PPh)

Penerimaan PPh di seluruh Kota/Kabupaten lingkup Jawa Timur s.d. Triwulan II-2018 sebesar Rp18,2 triliun, meningkat 2,19 persen bila dibandingkan s.d. Triwulan II-2017 sebesar Rp17,81 triliun.

**Grafik2.1 RealisasiPenerimaanPPhKabupaten/Kota
LingkupProvinsiJawaTimurTahun 2018 (dalam miliar Rupiah)**



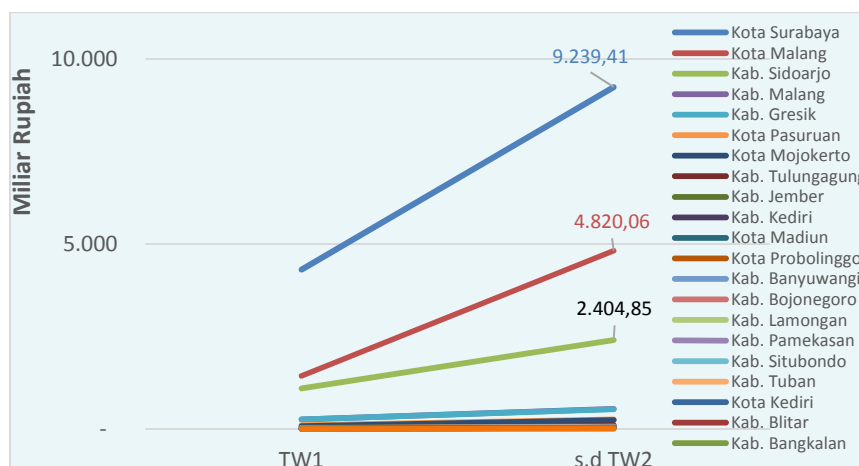
Sumber: SPAN

Kenaikan terbesar PPh di Kota Surabaya sebesar Rp9,16 triliun, disusul Kota Malang Rp2,36 triliun dan Kabupaten Sidoarjo Rp1,96 triliun. Namun, peningkatan penerimaan pajak penghasilan di ketiga kota besar tersebut tidak diikuti kenaikan secara signifikan oleh kota/kabupaten lain di Jawa Timur.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerimaan PPN per kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

**Grafik2.2 RealisasiPenerimaan PPNKabupaten/Kota
LingkupProvinsiJawaTimurTahun 2018 (dalam Miliar Rupiah)**



Sumber: SPAN

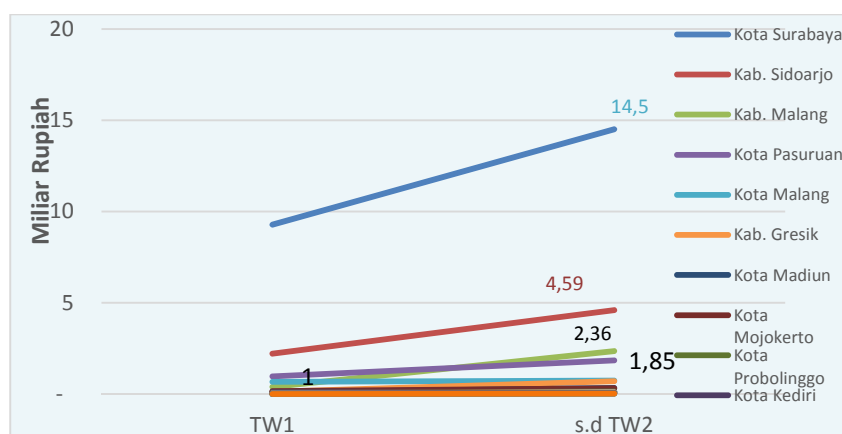
Penerimaan PPN s.d. Triwulan II-2018 juga mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp18,97 triliun. Namun, penerimaan s.d. Triwulan II-2018 ini lebih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan s.d. Triwulan II-2017 yaitu Rp19,40 triliun atau turun sebesar 2,22 persen. Penerimaan PPN tertinggi juga dibukukan oleh

3 Kota besar, yaitu Kota Surabaya Rp9,24 triliun, Kota Malang Rp4,82 triliun dan Kabupaten Sidoarjo Rp2,40 triliun. Sedangkan kota lain lingkup provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan yang tidak signifikan (total penerimaan rata-rata kurang dari Rp1 triliun).

c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Penerimaan PPnBM per kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Grafik2.3 Realisasi Penerimaan PPnBM Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 (dalam Miliar Rupiah)



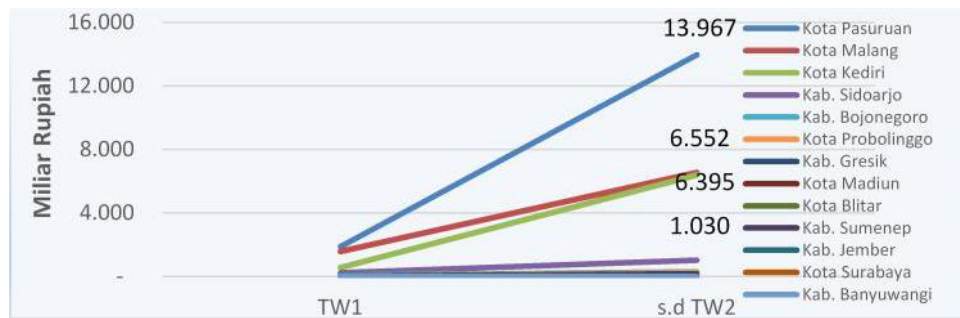
Sumber: SPAN

Total penerimaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) s.d. Triwulan II-2018 Provinsi Jawa Timur sebesar Rp26,66 miliar. Angka penerimaan PPnBM tersebut disumbangkan secara dominan oleh Kota Surabaya, yaitu sebesar Rp14,51 miliar. Daerah lain yang menyumbang lebih dari satu miliar rupiah adalah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, dan Kota Pasuruan. Sedangkan kota/kabupaten lain mencatatkan angka penerimaan PPnBM dengan total kurang dari Rp1 miliar.

d) Penerimaan Cukai

e) Produksi atas barang-barang yang dikenakan tarif cukai meningkat tajam pada Triwulan II-2018 pada umumnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada Triwulan berkenaan. Disamping itu keseriusan dan gencarnya pemberantasan cukai ilegal di Jawa Timur sangat mempengaruhi peningkatan penerimaan negara dari cukai di tahun 2018. Secara umum penerimaan Cukai s.d. Triwulan II-2018 di wilayah Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan yang tajam, yaitu sebesar Rp29,02 triliun bila dibandingkan dengan penerimaan selama kurun waktu Triwulan I-2018 yang sebesar Rp4,45 triliun.

Grafik 2.4 Realisasi Penerimaan Cukai Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: SPAN

Penerimaan cukai s.d.Triwulan II-2018 ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan padaTriwulan yang sama tahun 2017 yaitu sebesar Rp24,85 triliun.

“Pencapaian Pajak hingga Mei tumbuh sebesar 11,07 persen atau mencapai Rp 16,35 triliun, jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu.”

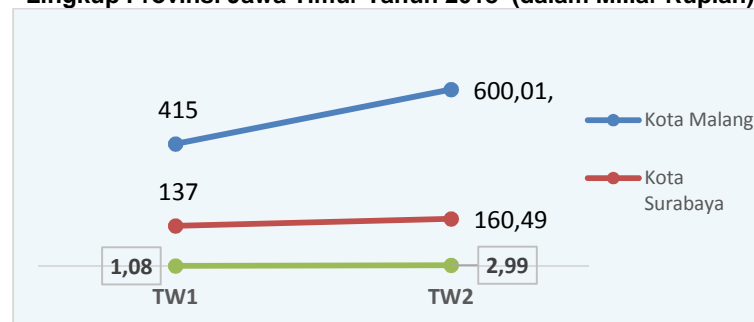
- Heru Budhi Kusumo, Kabid PPHM Kanwil DJP Jatim I, Radar Surabaya, 5 Juni 2018 -

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

a) Penerimaan PNBP Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan

PNBP Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan yang dihasilkan oleh Satker Badan Layanan Umum (BLU) di Bidang Pendidikan pada Triwulan II-2018 di wilayah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp763,49 miliar. Kota yang berkontribusi dalam memperoleh PNBP adalah Kota Malang, Kota Surabaya dan kota Madiun.

Grafik 2.5 Realisasi PNBP Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 (dalam Miliar Rupiah)



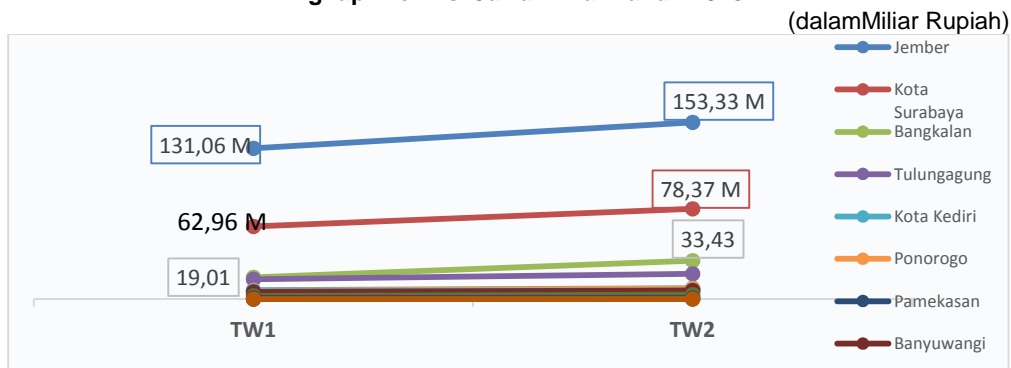
Sumber: SPAN

b) Penerimaan PNBP Pendapatan Uang Pendidikan

Pendapatan Uang Pendidikan dihasilkan oleh satker yang mengurus bidang pendidikan di lingkup Jawa Timur s.d. Triwulan II-2018 sebesar Rp325,5 miliar. Pendapatan ini meningkat sebesar 24,64 persen bila

dibandingkan dengan PNBP pendapatan Uang pendidikan pada Triwulan I-2018, yaitu sebesar Rp261,16 miliar.

Grafik2.6 Realisasi PNBP Pendapatan Uang Pendidikan Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur Tahun 2018



Sumber: SPAN

"Pada 24 Mei 2018, sebanyak 1500 orang, PNBP yang masuk sebesar Rp135.717.000 dan masih tersisa 100 orang belum membayar serta pada 31 Mei, dengan 285 orang pelanggar, yang datang membayar sebanyak 175 orang dan sisanya 110 pelanggar yang belum bayar. Dari hasil itu sebesar Rp 17.500.000 masuk kas negara. Dari total pelanggar 4.285 pelanggar lalin selama bulan Mei, yang belum membayar denda tersisa 510 orang."

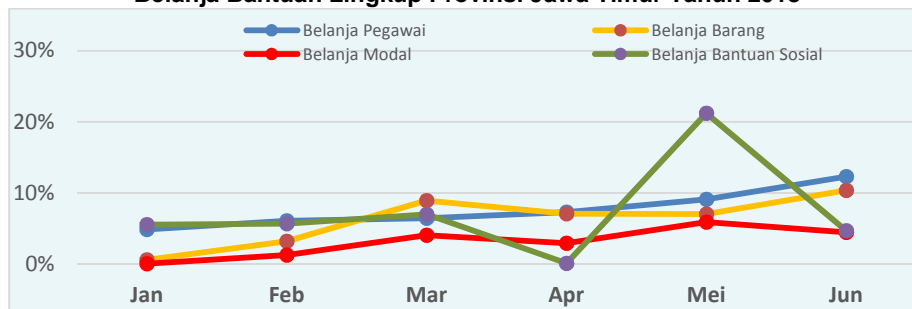
- Novriadi, Kasi Pidum Kejari Kota Malang, SurabayaPost.id, 1 Juni 2018-

B. Belanja Negara

Belanja negara lingkup Provinsi dapat dibagi menjadi duakelompok besar yaitu:

1. Belanja Pemerintah Pusat

Grafik2.7 Tren Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Lingkup Provinsi Jawa Timur Tahun 2018



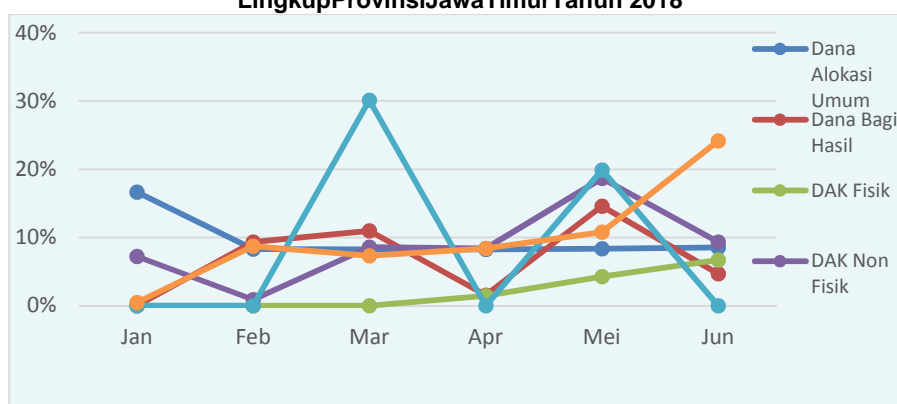
Sumber : SPAN

Total realisasi belanja pemerintah pusat s.d.Triwulan II Tahun 2018 adalah sebesar Rp18,97 triliun atau 42,76 persen dari total pagu belanja Rp44,38 triliun. Tren realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada umumnya terus mengalami kenaikan hingga akhir bulan Juni 2018, sedangkan Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan pada bulan Juni 2018, meskipun sempat mengalami kenaikan pada bulan Mei 2018.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pagu total Dana Transfer ke Daerah pada lingkup Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp66,65 triliun yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan Dana Intensif Daerah. Sedangkan pagu total Dana Desa adalah sebesar Rp6,34 triliun. Realisasi total Dana Transfer dan Dana Desa s.d. Triwulan II-2018 sebesar Rp39,76 triliun atau 53,01persen dari total pagu. Adapun tren realisasi Dana Transfer dan Dana Desa terhadap pagu masing-masing s.d. Triwulan II-2018 beragam

Grafik2.8 Tren Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa LingkupProvinsiJawaTimurTahun 2018



Sumber : SPAN

3. Pengelolaan BLU

Jumlah satker Badan Layanan Umum (BLU) di wilayah Provinsi Jawa Timur sebanyak 26 Satker BLU yang tersebar dalam 5 rumpun (Pendidikan, Kesehatan, Kawasan, Pengelolaan Dana, dan Lainnya). Hingga akhir Semester I-2018 semua satker BLU tersebut telah menghasilkan pendapatan BLU total sebesar Rp1,27 triliun. Pendapatan BLU di wilayah Provinsi Jawa Timur adalah sebagaimana terinci dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Pendapatan BLU di Wilayah Jawa Timur Tahun 2017 dan 2018

Uraian	Semester I 2017	Semester I 2018
Pendapatan Jasa Layanan Umum	1.051.980.004.511	1.215.337.160.675
Pendapatan Hibah BLU	-	-
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	29.001.767.340	37.082.096.322
Pendapatan BLU Lainnya	19.454.221.230	21.682.422.806
Jumlah Penerimaan BLU	1.100.435.993.081	1.274.101.679.803

Sumber : OMSPAN

Pendapatan BLU s.d. akhir semester I-2018 tersebut meningkat 15,78 persen bila dibandingkan dengan total pendapatan BLU s.d. akhir semester I-2017 yang berjumlah sebesar Rp1,10 triliun.

4. Manajemen Investasi Pusat

a. Pengelolaan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah/BUMD

Debitur yang wajib melaksanakan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur untuk *outstanding* pinjaman per-30 Juni 2018 tersisa 4 Debitur dengan 5 pinjaman. Dua pinjaman telah dilunasi oleh debitur, sedangkan tiga pinjaman lainnya melalui proses penghapusan bersyarat oleh pemerintah yaitu pinjaman PDAM Kabupaten Malang, PDAM Kabupaten Nganjuk dan PDAM Kabupaten Sumenep dengan Hak Tagih Pemerintah keseluruhan sebesar Rp27,16 miliar.

Tabel 2.3 Posisi Pinjaman Pemdadan BUMD Posisi Per 30 Juni 2018

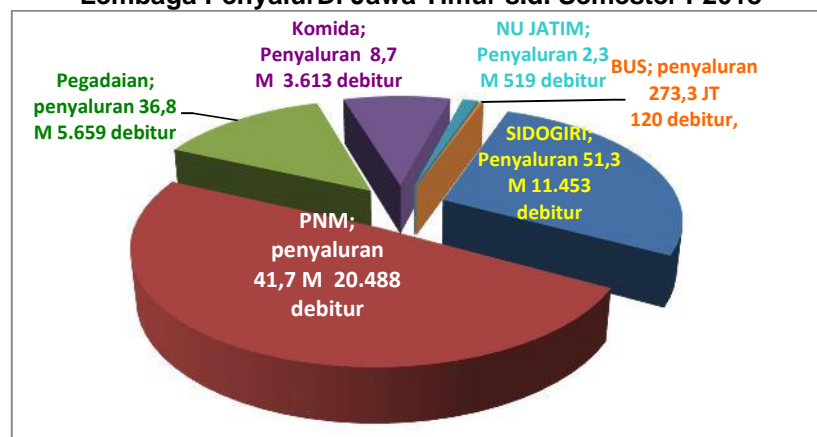
No	LOAN ID	DEBITUR	NPPP	KATEGORI	SUMBER DANA	REOG	Hak Tagih Pemerintah (Rp)
1	2091001	PDAM KAB MALANG	RDA-181/DP3/1994	BUMD	RPD	RESTRUKTURISASI PDAM (PMK-120)	5,910,832,897.38
2	2091201	PDAM KAB NGANJUK	RDA-225/DP3/1996	BUMD	RPD	RESTRUKTURISASI PDAM (PMK-120)	11,253,042,579.10
3	2092101	PDAM KAB SUMENEP	RDA.P5-130/DP3/1993	BUMD	RPD	RESTRUKTURISASI PDAM (PMK-114) PUPN	9,999,994,546.13
4	2093701	PDAM KOTA SURABAYA	SLA-740/DP3/1994	BUMD	SLA	LUNAS	-
5	2093801	PDAM KOTA SURABAYA	SLA-766/DP3/1994	BUMD	SLA	LUNAS	-

Sumber: KPPN Khusus Investasi

b. Pembiayaan Kredit Ultra Mikro (UMi)

Pengelolaan investasi pemerintah lainnya adalah pembiayaan Kredit Ultra Mikro (UMi) oleh salah satu BLU Kementerian Keuangan yaitu Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Grafik 2.9 Penyaluran Kredit Ultra Mikro Per Lembaga Penyalur Di Jawa Timur s.d. Semester I-2018



Sumber Data : Dit. SMI posisi 30 Juni 2018

Jumlah Penyaluran UMi hingga akhir semester I-2018 sebesar Rp141,17 miliar tersebar di seluruh daerah di Jawa Timur, dengan debitur sebanyak 41.852 debitur.

C. Prognosis Realisasi APBN

**Tabel Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Jawa Timur
s.d. Triwulan IV Tahun 2018**

(dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d Triwulan II		Tahun 2018	
		Rp	% Realisasi Terhadap pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap pagu
Pendapatan Negara	195.596,45	70.590,04	36,09	191.312,01	97,81
Belanja Negara	119.368,44	56.528,32	47,36	113.610,26	95,18
Surplus/Defisit	76.228,01	14.061,72	18,45	73.168,73	95,99

Perkiraan realisasi pendapatan negara s.d. akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp 191.312,01 triliun atau 97,81 persen dari pagu pendapatan yang ditetapkan Rp195,59 triliun. Faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan negara s.d. Triwulan IV-2018 adalah bahwa pertumbuhan ekonomi diproyeksikan terus meningkat dibandingkan pada Triwulan I-2018 ($q-q$). Belanja negara juga diperkirakan akan mengalami peningkatan s.d. akhir tahun 2018 sebesar Rp113,61 triliun atau sebesar 95,18 persen. Belanja negara yang diperkirakan lebih dari 90 persen ini diharapkan mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Timur.

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

APBD merupakan mesin pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah serta sebagai salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan untuk mewujudkan masyarakat daerah yang sejahtera dan mandiri.

**Tabel 3.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Jawa Timur
s.d. Akhir Triwulan II Tahun 2017 dan Tahun 2018**

(dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
PENDAPATAN	111.191,92	53.595,79	114.454,22	60.234,60
PAD	30.809,36	15.073,00	32.966,43	17.520,04
Pajak Daerah	19.531,50	10.050,22	21.018,82	11.271,18
Retribusi daerah	1.527,41	650,92	1.453,21	675,99
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	809,73	584,61	828,47	738,16
Lain-lain PAD yang sah	8.940,73	3.787,25	9.665,93	4.834,71
Pendapatan Transfer	79.109,90	37.784,55	77.721,08	41.637,27
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	66.912,15	31.313,13	65.888,75	34.909,69
Dana Bagi Hasil Pajak	4.141,39	1.910,07	5.545,60	2.446,18
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	3.998,15	1.931,98	1.946,73	995,43
Dana Alokasi Umum	40.304,00	20.135,46	39.619,18	22.883,25
Dana Alokasi Khusus	18.468,61	7.335,62	18.777,23	8.584,82
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	6.546,76	3.827,89	6.401,52	3.787,31
Dana Otonomi Khusus	1.325,12	773,88	546,46	189,82
Dana Intensif Daerah	74,54	48,52	-	-
Dana Penyesuaian	4.179,15	2.427,50	5.467,48	3.261,38
Dana Desa	967,96	577,99	387,58	336,11
Transfer Pemerintah Provinsi	5.289,82	2.392,40	5.110,29	2.546,75
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4.048,71	1.902,88	5.098,57	2.538,86
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1.241,10	489,52	11,72	7,90
Transfer Bantuan Keuangan	361,17	251,13	320,52	393,52
Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	1.272,65	738,25	3.766,71	1.077,28
Pendapatan Hibah	317,27	126,15	2.318,23	268,57
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	955,39	612,10	1.448,48	808,71
BELANJA	101.385,04	32.901,31	112.537,42	39.102,32
Belanja Pegawai	43.187,78	16.160,60	44.364,49	17.734,56
Belanja Barang	24.830,32	7.839,79	28.115,20	9.191,16
Belanja Bunga	9,91	4,01	7,89	3,66
Belanja Subsidi	20,95	1,36	88,46	80,86
Belanja Hibah	9.651,67	3.627,90	10.768,26	5.083,73
Belanja Bantuan sosial	537,98	118,95	670,09	185,73
Belanja Bantuan Keuangan	5.161,01	2.608,65	8.827,13	3.482,39
Belanja Modal	17.663,33	2.473,27	19.467,35	3.291,71
Belaanja Tidak Terduga	322,08	66,78	228,54	48,52
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	12.212,32	5.881,63	9.630,97	4.259,79
Transfer/Bagi Hasil Kedesa	7.458,65	3.441,68	7.154,92	3.542,85
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.484,64	2.497,25	5.758,18	2.580,70
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.974,01	944,43	1.396,74	962,14
Transfer Bantuan Keuangan	4.753,67	2.439,95	2.476,05	716,94
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	584,26	257,63	-	-
Transfer Dana Desa	968,94	479,35	-	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	3.200,48	1.702,97	2.476,05	716,94
Belanja dan Transfer	113.597,36	38.782,93	122.168,38	43.362,10
Surplus / Defisit	(2.405,45)	14.812,86	(7.714,16)	16.872,49

Sumber : LRA Jatim Pemprov/Kab/Kot/SIKD

APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 2,93 persen atau sebesar Rp114.454,22 miliar. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II-2018 sebesar Rp60.234,60 miliar atau sebesar 52,63 persen dari pagu, dengan penyumbang terbesar dari pendapatan transfer, yaitu sebesar 41.637,27 miliar atau sebesar 69,13 persen dari total realisasi pendapatan. Pagu Belanja

Daerah tahun 2018 sebesar Rp112.537,42 miliar meningkat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp101.385,04 miliar. Realisasi belanja daerah sampai dengan Triwulan II-2018 juga mengalami kenaikan, yaitu Rp 39.102,32 miliar, dibandingkan dengan belanja daerah pada Triwulan II-2017 yang sebesar Rp32.901,31 miliar. Sampai dengan Triwulan II-2018 APBD lingkup Provinsi Jawa Timur mengalami surplus sebesar Rp16.872,49 miliar.

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

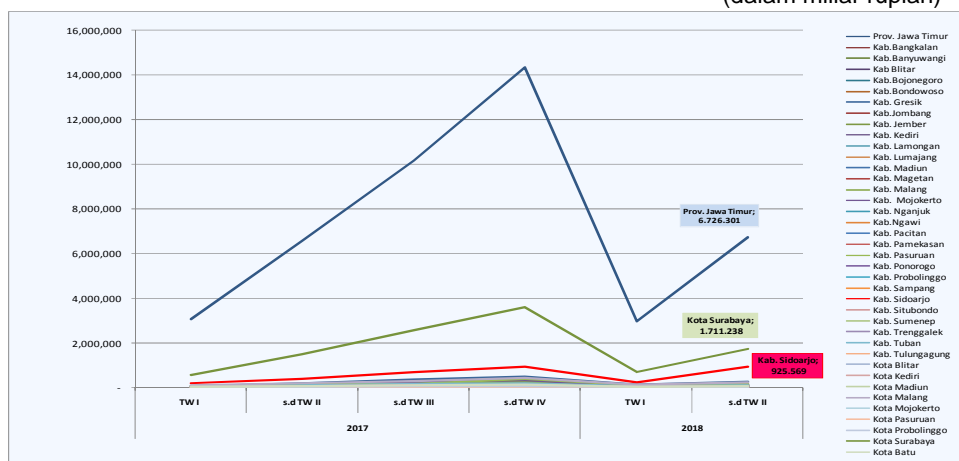
Meliputi PAD agregat seluruh Pemda Jawa Timur berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

a) Penerimaan Pajak Daerah

Jumlah pajak daerah yang berhasil dihimpun Jawa Timur sampai dengan periode Triwulan II-2018 sebanyak Rp11.271,18 miliar atau 53,62 persen dari perkiraan targetnya sebesar Rp21.018,82 miliar dan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Triwulan II-2017 (y-y) yaitu dengan perolehan sebanyak Rp10.050,22 miliar. Penghimpun pajak daerah terbesar adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp6.726,30 miliar.

Grafik 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur s.d Triwulan II-2018

(dalam miliar rupiah)

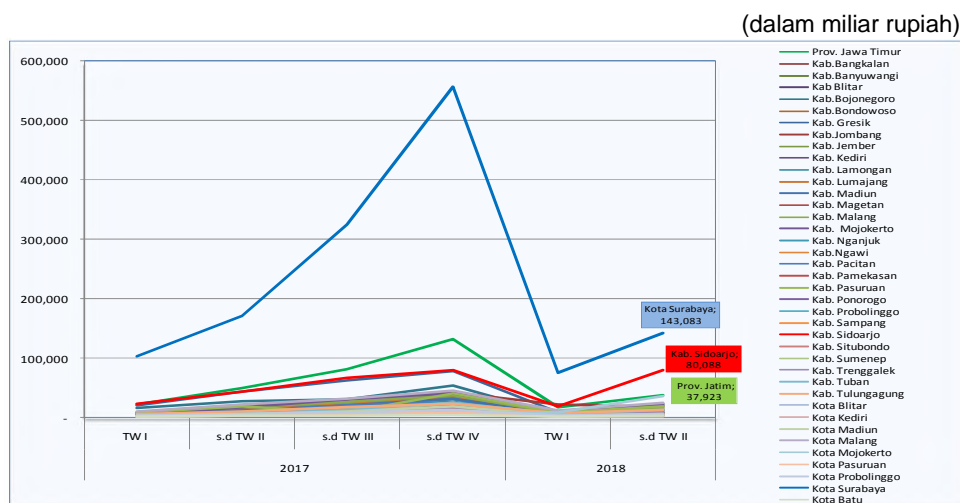


Sumber : LRA Jatim Pemprov/Kab/Kot/SIKD

b) Penerimaan Retribusi Daerah

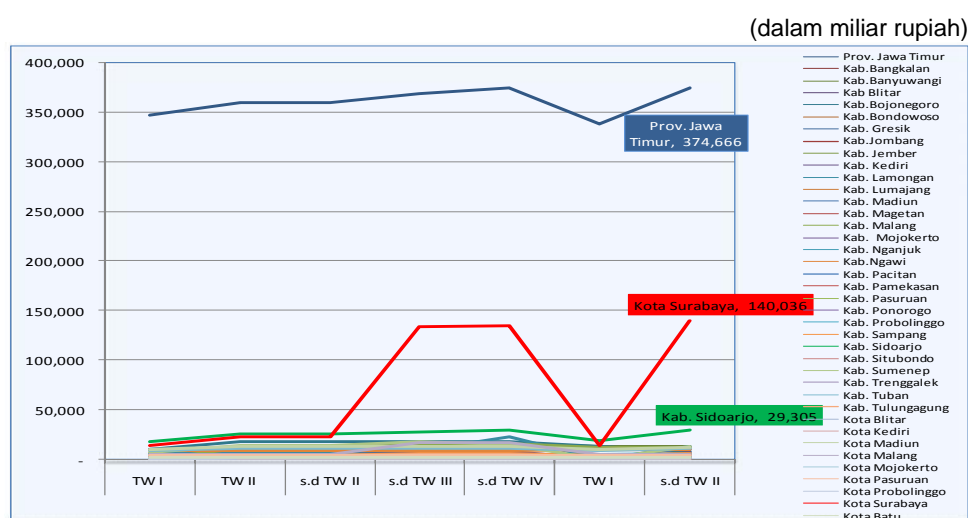
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah di Jawa Timur hingga periode Triwulan II-2018 tercatat sebanyak Rp675,99 miliar. Jumlah tersebut mencapai 46,52 persen dari target penerimaan pada APBD sebesar Rp1.453,21 miliar. Kontribusi terbesar terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah Kota Surabaya sebesar Rp143,08 miliar.

Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur Triwulan II-2018



c) Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Grafik 3.3 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur Triwulan II- 2018



Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang masuk ke Kas daerah di Jawa Timur sampai dengan Triwulan II-2018 telah mencapai Rp738,16 miliar atau 89,10 persen dari target sebesar Rp828,47 miliar. Penyumbang terbesar Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan untuk Triwulan II-2018 adalah Pemerintah Provinsi yang mencapai Rp374,67 miliar atau mencapai 50,76 persen dari total penerimaan.

Tingkat kemandirian keuangan daerah berdasarkan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah di Jawa Timur sebesar 29,09 persen. Sumber PAD terbesar berasal dari pajak daerah, yaitu sebesar 64,33 persen dari total PAD.

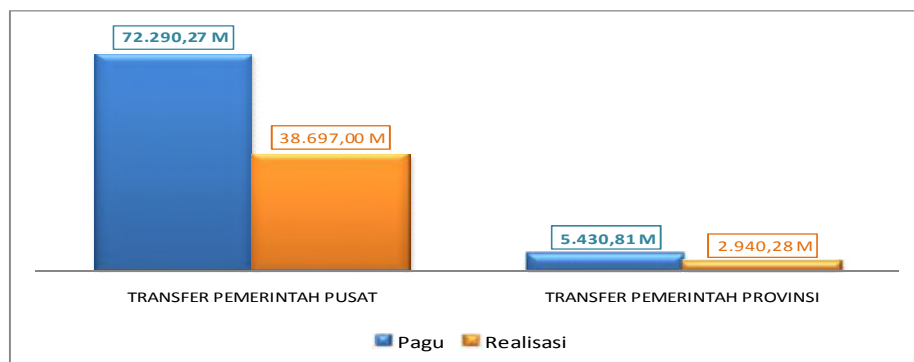
“Sejumlah terobosan diantaranya pelayanan online menjadi salah satu alasan target PAD Kota Surabaya naik Rp 1 triliun setiap tahun. Saat ini sudah ada delapan pembayaran pajak daerah yang menggunakan transaksi digital.”

- Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Radar Surabaya, 3 Juni 2018 -

2. Pendapatan Transfer

Tahun 2018, total pagu pendapatan transfer agregat seluruh Pemda di Jawa Timur (provinsi/ kabupaten/kota) berupa transfer dana pemerintah pusat (transfer dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat lainnya) sebesar Rp,72.290,27 miliar, sementara transfer pemerintah provinsi (DBH) dan transfer bantuan keuangan sebesar Rp5.430,81 miliar.

Grafik 3.4 Pagu dan Realisasi Penyerapan Dana Transfer Lingkup Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan II-2018



Sumber : LRA Jatim Pemprov/Kab/Kot/SIKD

Pada Triwulan II-2018, realisasi DAU mencapai Rp22.883,25 miliar (naik 13,65 persen) dibandingkan Triwulan II-2017 yang sebesar Rp20.135,46 miliar. Pagu Dana Transfer DAK Fisik turun dari Rp5.006,52 miliar di tahun 2017 menjadi Rp3.779,00 miliar di tahun 2018, salah satu penyebabnya adalah Pemerintah Kota Madiun tidak mendapat penyaluran DAK Fisik. Realisasi transfer DBH Pajak sampai dengan Triwulan II-2018, sebesar Rp2.446,18 miliar naik (28,07 persen) dibanding tahun 2017 pada periode yang sama sebesar Rp1.910,07. Pagu Dana Desa (DD) pada tahun 2018 turun (59,96 persen) menjadi Rp387,58 miliar dari pagu tahun 2017 yang sebesar Rp967,96 miliar. Hal ini antara lain disebabkan pada tahun 2018 ada penambahan variabel afirmasi dalam formula perhitungan, yang diberikan kepada desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi.

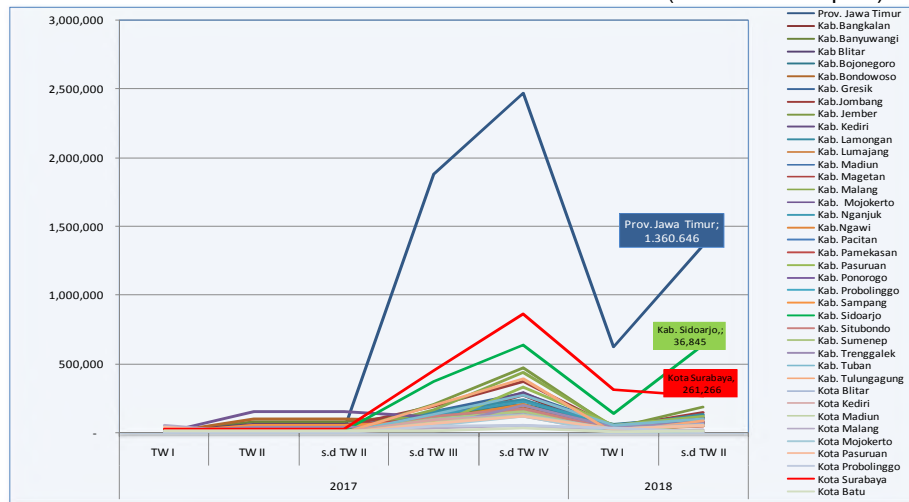
“Selama ini kucuran Dana Desa berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

- Bupati Lamongan Fadeli, Surya, 31 Mei 2018 -

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Grafik 3.5 Pagu dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lingkup Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2017-2018 (y-y)

(dalam miliar rupiah)



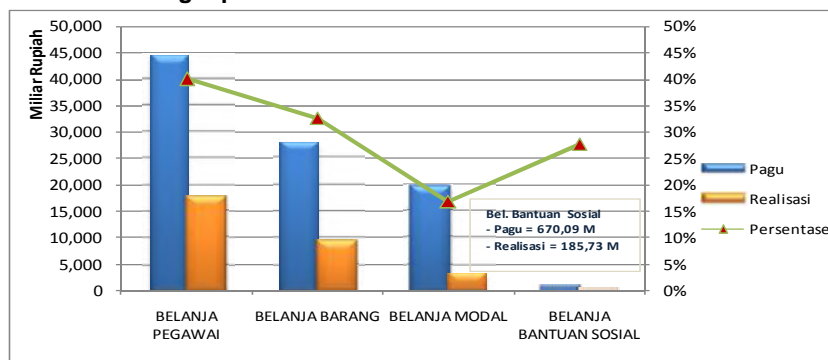
Sumber : LRA Jatim Pemprov/Kab/Kot/SIKD

Pagu lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dan pendapatan lainnya, tahun 2018 naik hingga lebih dari 195,97 persen. Realisasi sampai dengan Triwulan II-2018, pendapatan hibah mencapai Rp268,57 miliar atau naik 112,90 persen dan pendapatan lainnya mencapai Rp808,71 miliar atau naik 32,12 persen dibandingkan Triwulan II-2017.

B. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Grafik 3.6 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Lingkup Provinsi Jawa Timur s.d Triwulan II-2018



Sumber : LRA Jatim Pemprov/Kab/Kot/SIKD

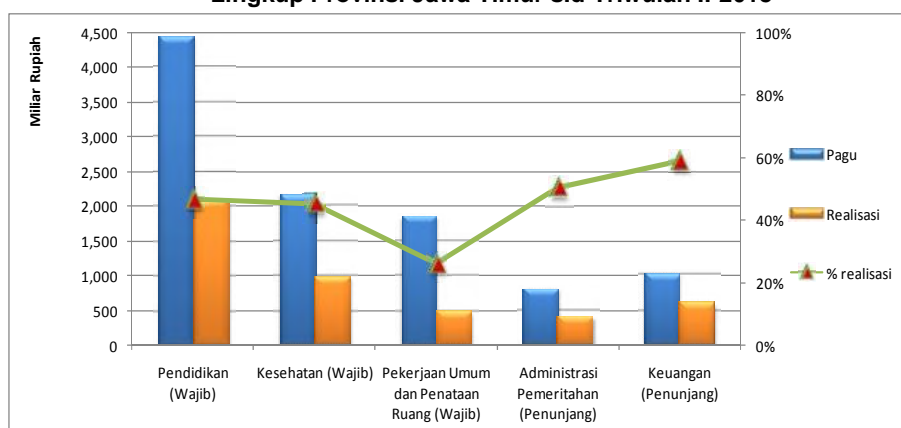
Alokasi untuk Belanja Pegawai oleh Pemerintah Daerah di Jawa Timur masih mendominasi pagu belanja pada APBD tahun 2018, sebesar Rp44.364,49 miliar.

Sampai dengan Triwulan II-2018 realisasi belanja pegawai sebesar Rp17.734,56 miliar atau 39,97 persen dari pagu. Sementara capaian realisasi Belanja Barang sebesar 32,69 persen dan Belanja Modal 16,91 persen serta Belanja Bantuan Sosial sebesar 27,72 persen dari total pagu tiap jenis belanja.

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Belanja APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, dihimpun berdasarkan data dari tujuh kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu Magetan, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Kota Malang, Kota Surabaya dan Kota Batu. Belanja yang memiliki pagu tertinggi adalah Pendidikan (43,08 persen) Realisasi sampai dengan Triwulan II-2018 mencapai Rp4,56 miliar atau 44,22 persen dari total pagu.

Grafik 3.6 Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan (Lima Urusan Tertinggi) Lingkup Provinsi Jawa Timur s.d Triwulan II-2018



Sumber : LRA Jatim Pemprov/Kab/Kot/SIKD

C. Prognosis Realisasi APBD sampai dengan Akhir Tahun 2018

Tabel 3.2 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan IV Tahun 2018

Uraian	Pagu	Realisasi s.d Tw. I Tahun 2018		Perkiraan Realisasi s.d Tw. IV Tahun 2018	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Daerah	114.882,39	26.219,95	22,82%	116.031,21	101%
Belanja Daerah	121.411,01	14.631,13	12,05%	127.481,56	105%
Surplus / Defisit	(6.528,62)	11.588,81	10,77%	(11.450,35)	-4,00%

Sumber : LRA Jatim Pemprov/Kab/Kot/SIKD

Hasil perkiraan pendapatan daerah dan belanja daerah Jawa Timur dipengaruhi oleh berbagai kebijakan fiskal diantaranya kebijakan yang tetap memprioritaskan transfer ke daerah dan dana desa, DAK dan Dana Desa akan didorong terus untuk menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menyamakan prioritas daerah atau membuat sinkronisasi antara prioritas daerah dan prioritas nasional.

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) Tingkat Wilayah yang mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk 39 Pemerintah Daerah.

**Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian
Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Timur s.d Triwulan II Tahun 2018 (dalam Juta Rupiah)**

Uraian	2018				2017
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	70,590,037	55,837,186	126,427,222	691.16%	15,979,896
Pendapatan Perpajakan	67,343,940	10,739,050	78,082,989	726.65%	9,445,717
Pendapatan Bukan Pajak	3,246,097	6,387,600	9,633,697	49.72%	6,434,397
Hibah	-	388,759	388,759	289.61%	99,782
Transfer	-	38,321,777	38,321,777	0.00%	-
Belanja Negara	59,435,469	38,739,150	98,174,619	144.57%	40,141,906
Belanja Pemerintah	19,678,232	36,571,362	56,249,595	56.52%	35,937,640
Transfer	39,757,237	2,167,788	41,925,024	897.20%	4,204,266
Surplus / (Defisit)	11,154,567	17,098,036	28,252,603	-216.93%	(24,162,010)
Pembiayaan	-	8,022,563	8,022,563	15.87%	6,923,882
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	8,629,545	8,629,545	21.24%	7,118,002
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	606,982	606,982	212.68%	194,120
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	11,154,567	25,120,599	36,275,167	-310.44%	(17,238,129)

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Jatim

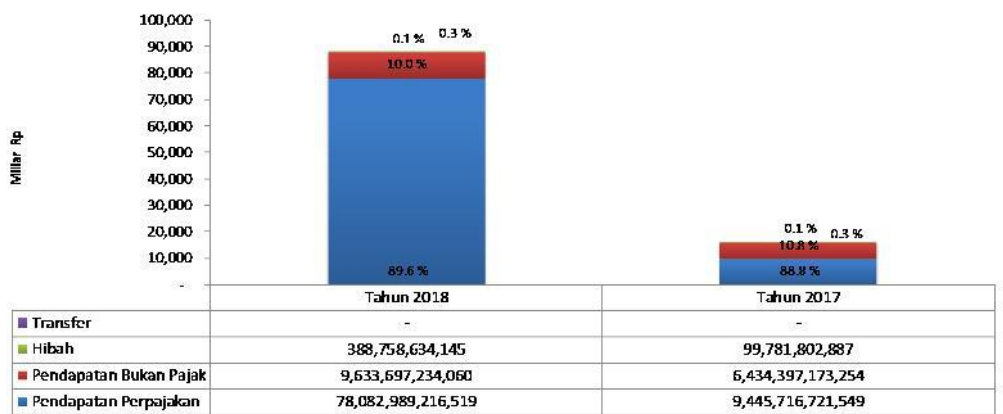
Realisasi Pendapatan Negara konsolidasi sampai dengan triwulan II tahun 2018, mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp15,98 triliun menjadi Rp126,43 triliun di tahun 2018 atau meningkat 691,17 persen. Dari sisi belanja, realisasi belanja negara konsolidasi 2018 mengalami kenaikan 144,58 persen dari Rp40,15 triliun di tahun 2017 menjadi Rp98,17 triliun. Di tahun 2018 mengalami Surplus anggaran sebesar Rp28,26 miliar sedangkan di tahun 2017 defisit sebesar Rp24,17 miliar. Pembiayaan untuk tahun 2018 mengalami kenaikan dari Rp7,11 triliun di tahun 2017 menjadi Rp8,02 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 15,88 persen.

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Pemerintah Umum (*General Government Revenue*) atau Pendapatan Negara Konsolidasian di Wilayah Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar Rp49,80 triliun atau mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 sebesar Rp27,56 triliun yang terdiri dari Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Bukan Pajak dan Hibah.

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

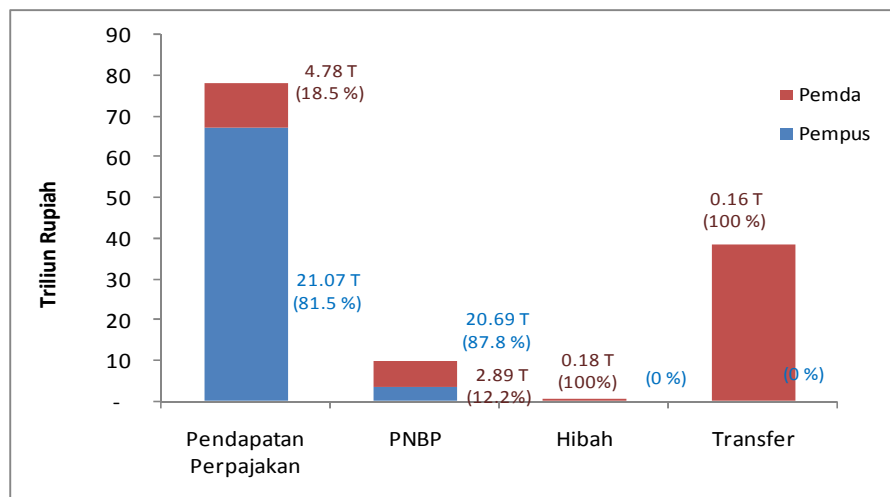
Grifik 4.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Jawa Timur s.d Triwulan II Tahun 2018 dan Tahun 2017



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Jatim

Grifik perbandingan tersebut menggambarkan porsi per jenis pajak terhadap total Pendapatan Negara Konsolidasi. Pada Struktur Pendapatan Perpajakan Konsolidasian tahun 2018, porsi terbesar berasal dari Pendapatan Perpajakan sebesar 88,6 persen atau sebesar Rp78,09 triliun dari total pendapatan perpajakan yang sebesar Rp88,11 triliun. Pendapatan Bukan Pajak menyumbang sebesar Rp9,63 triliun atau mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp6,43 triliun. Sedangkan untuk Pendapatan Hibah berkontribusi 0,8 persen atau sebesar Rp388,76 miliar di tahun 2018.

Grifik 4.2 Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Jawa Timur s.d Triwulan II Tahun 2018



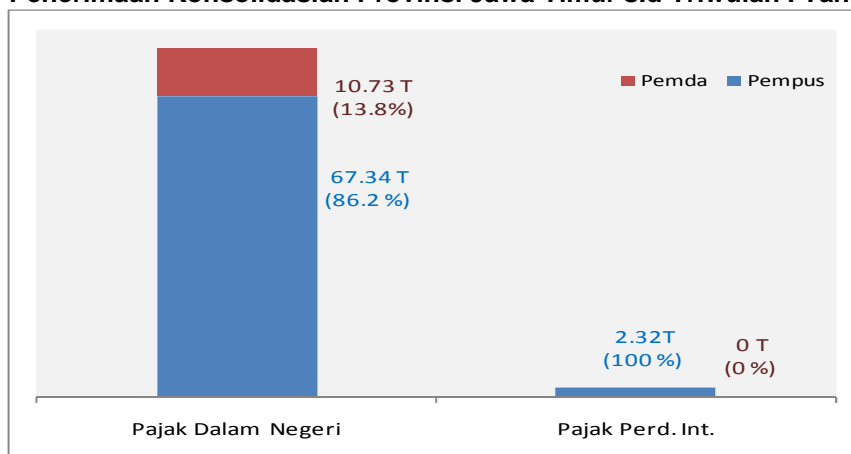
Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Jatim

Pada Struktur Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan II tahun 2018, Pendapatan Pemerintah Pusat hanya mendominasi untuk setiap jenis Pendapatan Perpajakan. Dari total Pendapatan Perpajakan

Konsolidasian tahun 2018 sebesar Rp126,43 triliun, porsi pendapatan Pemerintah Pusat mencapai 55,8 persen atau sebesar Rp70,59 triliun, sedangkan pendapatan Pemerintah Daerah sebesar 44,2 persen atau sebesar Rp55,84 triliun. Untuk Pendapatan Perpajakan, kontribusi pendapatan pemerintah pusat sebesar 86,2 persen atau sebesar Rp67,34 triliun dan pendapatan pemerintah daerah memberikan kontribusi sebesar 13,8 persen sebesar Rp10,74 triliun. Untuk Pendapatan Bukan Pajak porsi Pemerintah Pusat sebesar 33,7 persen atau sebesar Rp3,25 triliun sedangkan porsi pendapatan pemerintah daerah 66,3 persen atau sebesar Rp6,39 triliun.

2. Analisis Perubahan

Grafik 4.3 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Jawa Timur s.d Triwulan I Tahun 2018



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Jatim

Pemerintah Pusat masih mendominasi penerimaan jenis Pajak Dalam Negeri yang mencapai 86,2 persen atau sebesar Rp67,34 triliun, sedangkan pemerintah daerah memberikan kontribusi sebesar 13,8 persen atau sebesar Rp 10,73 triliun. Untuk Pajak Perdagangan Internasional seluruhnya merupakan kontribusi dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2,32 triliun.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Realisasi pendapatan sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebesar Rp.78,06 memberikan dampak kenaikan terhadap PDRB yang sebesar Rp.544,44 triliun. Realisasi tahun 2018 sebesar Rp87,72 triliun turun sebesar 8,49 persen dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp95,85 triliun.

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dan Tahun 2017

Uraian	2017		2018	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan	85,705,504,720,204	807.35%	78,082,989,216,519	-8.89%
PNBP	10,148,529,839,417	57.72%	9,633,697,234,060	-5.07%
Total	95,854,034,559,621	503.61%	87,716,686,450,579	-8.49%
PDRB /Pert. Ekonomi	496,94 T	5.11%	544,44T	3.35%

Sumber LKPK Kanwil DJPb Prov. Jatim

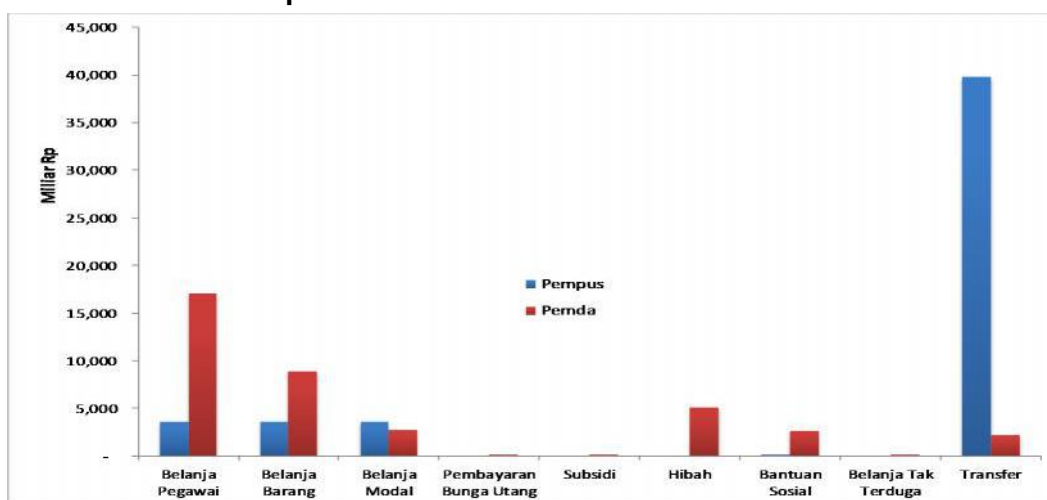
C. BELANJA KONSOLIDASIAN

Belanja Pemerintahan Umum (*General Government Spending*) atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Belanja Pemerintah merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah untuk melakukan stimulus fiskal, yaitu bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi permintaan agregat untuk selanjutnya diharapkan akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek.

Grafik Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2018



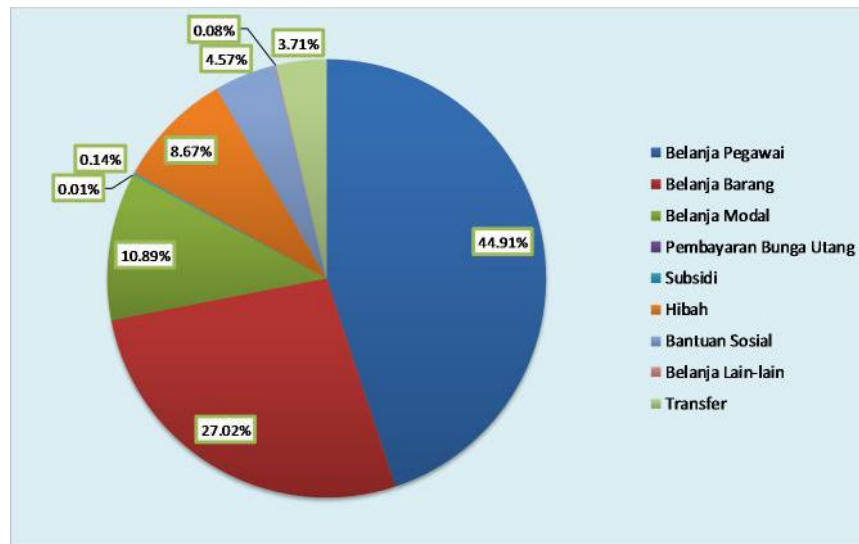
Sumber : SPAN

Dari Grafik di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh jenis belanja, porsi pengeluaran Pemerintah Daerah melebihi porsi pengeluaran Pemerintah Pusat kecuali porsi belanja modal dan transfer.

2. Analisis Perubahan

Menurut klasifikasi ekonomi, belanja pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2018



Porsi terbesar pada komposisi belanja konsolidasian Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan II tahun 2018 adalah belanja pegawai sebesar 44,91 persen lebih kecil dibanding periode yang sama tahun 2017 yang sebesar 46,03 persen. Belanja barang sebesar 27,02 persen lebih kecil jika dibanding tahun 2017 sebesar 32,51 persen. Sedangkan untuk belanja modal sebesar 10,89 persen lebih tinggi dibanding tahun 2017 yang sebesar 7,9 persen.

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional

Kebijakan Fiskal pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam alokasi anggaran dimaksudkan untuk mempengaruhi perekonomian, dalam hal ini untuk mempengaruhi permintaan agregat dan redistribusi pertumbuhan. Sektor konsumtif merupakan belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintah yang sifatnya rutin dan habis pakai yang *multiplier effect*-nya bersifat jangka pendek. Sedangkan sektor produktif merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk investasi mendanai kegiatan dalam rangka membentuk aset yang diharapkan menimbulkan *multiplier effect* yang berkelanjutan yang bersifat langsung dan tidak langsung. Dengan porsi terbesar pada belanja konsolidasian Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan II tahun 2018 adalah belanja pegawai kemudian diikuti belanja

barang yang masing-masing sebesar 44,91 persen dan 27,02 persen, sedangkan porsi Belanja modal hanya 10,89 persen maka untuk saat pemerintah berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adalah sebesar Rp58,41 triliun. Sedangkan PDRB provinsi Jawa Timur pada triwulan II tahun 2018 sebesar Rp9,63 triliun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB adalah sebesar 3,35 persen atau Rp544,44 triliun.

Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur triwulan II tahun 2018 ini lebih tinggi y to y 5,46 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017. Dengan demikian dapat dikatakan kondisi perekonomian membaik pada tahun 2018 ini, sehingga kontribusi belanja pemerintah dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kondisi perekonomian dimana kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB.

V. BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. Judul Isu Fiskal Regional Terpilih I

PAD Ditargetkan Tembus Rp 1 Triliun

Kebomas, Pemerintah Kabupaten Gresik menargetkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini sebesar Rp1 triliun. Untuk mencapai target itu, Pemkab Gresik mengandalkan sektor Pajak Daerah dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sekitar Rp196 miliar, secara gencar menggelar sosialisasi kepada wajib pajak dan peran aktif Bupati Gresik dalam pengawasan. Kepala Bidang Pajak Daerah BPPKAD, Ahmad Haris Fahman mengungkapkan, hingga Triwulan I, pencapaian PAD dari PPJ telah mencapai 30 persen, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai 30 persen, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 15 persen. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Gresik, Darmawan menjelaskan, PAD di Gresik juga ditunjang dari sektor wisata religi dan wisata pantai yang berada di wilayah Kecamatan Panceng, yakni Panatio Dalegan.

Radar Gresik - Sabtu, 5 Mei 2018

B. Judul Isu Fiskal Regional Terpilih II

UMKM *Backbone* Perekonomian Timur

Surabaya, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi *backbone* (tulang punggung) perekonomian Jawa Timur. Hal tersebut bisa terlihat pada fakta empiris di lapangan. Di antaranya adalah kinerja industri pengolahan dalam lima tahun terakhir *share* terhadap nasional semakin meningkat, dari 19,91 persen pada tahun 2013, meningkat menjadi 21,70 persen pada tahun 2017, demikian disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat peluncuran PPh Final UMKM 0,5 persen oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo di Jatim Expo, Surabaya, Jumat (22/6). Peluncuran tersebut menjadi bagian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak, yang dapat mendorong pelaku UMKM lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal karena Pemerintah memberikan kemudahan dalam membayar pajak, dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

Radar Surabaya - Sabtu, 23 Juni 2018